

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan sepenuhnya kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus semua kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Dengan diberlakukannya otonomi daerah menyebabkan perubahan pertanggungjawaban yang mulanya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat menjadi pemerintah daerah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Otonomi daerah memberikan dampak positif bagi DPRD untuk melaksanakan fungsinya sebagai pihak yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga tercipta *good governance* dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi.

DPRD memiliki peranan penting dalam mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan program kerja, dan rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan proses anggaran. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar anggota DPRD merupakan anggota baru yang terpilih dari partai pemenang pemilu yang memiliki latar belakang pekerjaan dan pendidikan yang berbeda-beda. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mereka menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Akibatnya, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memahami tugas dan wewenang dalam menjalani peran sebagai wakil rakyat.

Lemahnya peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja legislatif terhadap eksekutif. Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD memiliki dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politiknya yaitu sistem politik dan individu sebagai pelaku politik (Sastroatmojo, 1995). Nyatanya, kegiatan politik dilakukan oleh individu, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya berpedoman pada perilaku individu dengan pola-pola tertentu.

Dalam menjelaskan perilaku lembaga politik yang harus ditelaah bukanlah lembaganya, tetapi latar belakang individu yang menjalankan dan mengendalikan lembaga politik tersebut. Latar belakang individu yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu para anggota dewan. Untuk latar belakang anggota dewan tersebut terdiri dari *personal background*, *political background*, pengetahuan dan pemahaman anggota dewan mengenai anggaran, peraturan, kebijakan, dan prosedur pengawasan keuangan daerah.

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menyelenggarakan suatu lembaga atau organisasi. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari bagaimana *personal background* individu tersebut. *Personal background* merupakan latar belakang yang melekat pada diri setiap individu. Latar belakang ini meliputi aspek seperti nama, jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, pengalaman dalam berorganisasi, lama bekerja di pemerintahan, dan lain-lain. Untuk memberikan kontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi, maka harus dipastikan sumber daya manusia sudah dikelola dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imelda Sari (2017), menunjukkan bahwa variabel *personal background* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan

oleh Dwiva Ulan Sari (2016), menunjukkan bahwa variabel usia anggota dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah dan variabel tingkat pendidikan anggota dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

*Political background* merupakan latar belakang individu berdasarkan pengalaman selama terjun dalam dunia politik. *Political background* yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi pengalaman anggota dewan di DPRD dan jabatan anggota dewan tersebut di partai politiknya. Menurut La Palombara (1974), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislatif diantaranya yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal, pengalaman politik dan sifat personal. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firda Kharimah (2017), variabel *political background* berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega Wati Mandacan, Harijanto Sabijono, Treesje Runtu (2018), variabel *political background* berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah. Faktor lain yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah yaitu pengetahuan mengenai anggaran. Pengetahuan anggota DPRD mengenai anggaran merupakan sejauh mana pemahaman dalam penyusunan anggaran yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007), variabel pengetahuan anggota DPRD mengenai anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nasirwan (2009), variabel pengetahuan anggota dewan mengenai anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Hasilnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Rahmanti Arvitaningrum dan Abdullah Taman (2019), variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, persepsi anggota dewan tentang partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan APBD baik diuji secara parsial maupun simultan.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya yang masih tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah ( Studi Kasus pada DPRD Kota Solok)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *personal background* berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah *political background* berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
3. Apakah pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
4. Apakah pengalaman organisasi berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
5. Apakah jabatan di partai politik berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh *personal background* terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.



2. Untuk mengetahui pengaruh *political background* terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman organisasi terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh jabatan di partai politik terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi masukan dalam melaksanakan otonomi daerah, dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai bagaimana peran DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi serta menilai kinerja DPRD.
2. Bagi DPRD, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga DPRD diharapkan dapat membuat program kerja yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitasnya dan dapat menjalankan tugas sesuai dengan hak dan kewajibannya.
3. Bagi partai politik, dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi dalam merekrut anggota dewan dari masing-masing partai politik .

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

**BAB III : Metodologi Penelitian**

Menjelaskan tentang desain penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan tentang analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (studi kasus pada DPRD Kota Solok).

**BAB V : Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan saran.

